

KAUSALITAS ANTARA PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI MALUKU TAHUN 1994-2009

Andre Sapthu

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura
Jln. Ir. M. Putuhena, Kode Pos : 97233 Ambon

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kausalitas antara pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku 1994-2009 serta mengidentifikasi dan menganalisis kausalitas antara transfer pemerintah dan pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku 1994-2009.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Granger Causality Test* (*Uji Kausalitas Granger*) dengan model estimasi *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil penelitian menunjukkan terjadi pola kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke pendapatan asli daerah (*unidirectional causality from LPDRBt to LPADt*) dan tidak terjadi hubungan kausalitas antara dana transfer pemerintah dan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, dana transfer pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi dan Kausalitas Granger.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak

maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi daerah juga diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. (Arsyad,1999).

Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Agar pembangunan dapat terlaksana dan memberikan hasil yang optimal, maka diperlukan suatu dokumen rencana strategis (Renstra) sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program-program pembangunan. Rencana strategis atau dokumen perencanaan daerah merupakan program kerja kepala daerah (Gubernur) yang telah disahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Rencana strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang digunakan sebagai acuan oleh kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di berbagai daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya atau perkembangan yang baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun – tahun berikutnya (adanya pertumbuhan *output*).

Perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun bukan saja disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai PDRB selama tahun penelitian harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung PDRB menurut harga konstan (PDRB riil). Kemudian data PDRB riil diolah untuk memperoleh data laju pertumbuhan ekonomi.

Peranan pemerintah di dalam kegiatan ekonomi tercermin pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari dana transfer pemerintah (DTP), serta mengalokasi anggaran pendapatan tersebut pada

kegiatan ekonomi produktif yang diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data-data empiris yang diperoleh dari BPS Provinsi Maluku, memberi gambaran jelas bahwa kontribusi PAD masih sangat rendah terhadap APBD, meskipun kontribusinya mengalami peningkatan. Kondisi ini masih jauh dari harapan, di mana kondisi ideal kontribusi PAD harus di atas 50% dari total penerimaan APBD. Sebaliknya, peranan dana transfer pemerintah terhadap APBD justru semakin meningkat. Hal ini mencerminkan masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Maluku, sehingga tujuan dari dana transfer pemerintah sebagai “sarana edukasi” bagi pemerintah daerah belum sepenuhnya tercapai. Sesungguhnya pemerintah daerah diharapkan terdorong untuk secara intensif dan ekstensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga memenuhi kebutuhan atau menyamai, bahkan melebihi kapasitas fiskalnya.

Adanya ketergantungan Pemda terhadap pusat yang semakin besar, serta kemungkinan terjadinya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dalam rangka meningkatkan PAD, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terganggu. Berbagai hal yang menjelaskan kondisi pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer pemerintah (DTP) serta pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) di Provinsi Maluku, maka penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji mengenai *kausalitas antara variable Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Transfer*

Pemerintah Pusat (DTP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil. *Output* total riil suatu perekonomian dapat pula tetap konstan atau mengalami penurunan sepanjang waktu. Pertumbuhan ekonomi dapat pula terjadi karena kenaikan *output* per kapita. Dalam hal ini kenaikan taraf hidup diukur dengan *output* riil per orang. Karena itu pertumbuhan terjadi bila tingkat kenaikan *output* riil total lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk (Arsyad 1999).

Menurut Boediono (1999:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Ketentuan ini sangat penting diperhatikan dalam ekonomi wilayah, karena bisanya suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan/suntikan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan. Dalam kondisi seperti ini, sulit dikatakan ekonomi wilayah itu berkembang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan dan kesejahteraan diperlukan alat pengukuran yang tepat, salah satu di antaranya adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya.

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Djojohadikusumo, 1994:1).

Solow-Swan mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1997:57). Pandangan ini mengartikan bahwa sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Todaro (1997:105) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dipengaruhi oleh: (1) akumulasi modal yang mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik, dan semua sumber daya manusia; (2) pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja; (3) kemajuan teknologi. Parkin dan Bade (1997:290) menyatakan bahwa ada dua sumber pertumbuhan ekonomi yaitu, akumulasi modal dan perubahan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting di dalam kehidupan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi.

2.2 Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Suatu perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumber daya bersumber dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada pasar, akan menghasilkan kuantitas maksimal barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Namun dalam kenyataan sehari – hari, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal. Pada prakteknya, perekonomian pasar seringkali terilit kolusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi atau penggangguran; pada prakteknya pula, distribusi pendapatan di tengah masyarakat bersifat *laissez-faire* sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mengambil peran penting dalam perekonomian.

2.3 Transfer Pemerintah Pusat

Berbagai literatur ilmu ekonomi publik dan keuangan negara menyebutkan beberapa alasan perlunya dilakukan transfer dana dari pusat ke daerah (Simanjuntak, 2002). *Pertama*, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertical, *Kedua*, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal, *Ketiga*, adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah, *Keempat*, untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (*interjurisdictional spillover effects*), *Kelima*, untuk stabilisasi,

Dalam penyediaan fasilitas pelayanan bagi kepentingan publik oleh pemerintah daerah sebagai wujud desentralisasi sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dibiayai oleh APBD, dimana sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan, khusus untuk pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Sumber-sumber penerimaan terbesar dalam PAD adalah dari pajak dan retribusi daerah sedangkan pada Dana Perimbangan sumber penerimaan terbesar adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Besarnya PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula

kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab (Abimanyu dkk., 2005: 24-25).

III. METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas model **Granger Causality Test (Uji Kausalitas Granger)** dengan model estimasi *Ordinary Least Square (OLS)* untuk mengetahui kausalitas dana transfer pemerintah (DTP), pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Stasioneritas

Pada umumnya variable ekonomi bersifat nonstasioner sedangkan metode analisis *time series* mensyaratkan/mengasumsikanstasioneritas dari *series* yang digunakan.

Tabel 4.1
Uji Stasioner ADF dan PP pada Tingkat Level

Variabel	ADF	PP
LPDRB		
Tanpa konstanta dan trend	2.119682**	1.342161
Konstanta	-1.230341	-1.599230
Konstanta dan trend	-1.471324	-3.365341**
LPAD		
Tanpa konstanta dan trend	1.156224	1.113067
Konstanta	-0.937342	-1.566130
Konstanta dan trend	-2.381157	-3.817091**
LDTP		
Tanpa konstanta dan trend	4.677651***	4.855476***
Konstanta	-1.825179	-1.209169
Konstanta dan trend	-1.276910	-3.012992*

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 4.

Keterangan: * signifikan 10%; ** signifikan 5%; *** signifikan 1%

Hasil uji stasioneritas menunjukkan bahwa semua variabel tidak stasioner pada bentuk level karena nilai absolut statistik ADF maupun PP tidak menggambarkan secara meyakinkan nilai absolut kritisnya masing-masing variabel pada tingkat

signifikansi 1%, 5% dan 10%, karena ada perbedaan antara nilai ADF dengan PP sehingga dengan demikian, maka perlu dilakukan uji integrasi untuk mengetahui pada derajat berapa variabel-variabel tersebut stasioner dalam derajat yang sama.

Tabel 4.2
Transformasi Data
Uji Stasioner ADF dan PP pada Tingkat Differensiasi

Variabel	ADF	PP
LPDRB		
Tanpa konstanta dan trend	-3.781320***	-6.187195***
Konstanta	-5.662026***	-7.437720***
Konstanta dan trend	-4.715303***	-8.003878***
LPAD		
Tanpa konstanta dan trend	-6.129853***	-8.983031***
Konstanta	-6.923463***	-9.801865***
Konstanta dan trend	-6.482037***	-9.611671***
LDTP		
Tanpa konstanta dan trend	-4.912772***	-7.332397***
Konstanta	-5.018879***	-8.815671***
Konstanta dan trend	-5.701621***	-9.139199***

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 4.

Keterangan: * signifikan 10%; ** signifikan 5%; *** signifikan 1%

Hasil estimasi menunjukkan nilai *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* dan *Phillips-Perron* semua variabel yaitu LPDRB, LDTP

dan LPAD stasioner pada derajat integrasi pertama atau I(1).

4.2 Uji Kointegrasi

Tabel 4.3
Uji Kointegrasi (Metode Johansen)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	5 Percent Critical Value	1 Percent Critical Value
None **	0.677434	94.95061	77.74	85.78
At most 1 *	0.607759	59.87569	54.64	61.24
At most 2	0.399400	30.86341	34.55	40.49

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 4.

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level

Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level

Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level

Dari output *eviews* diindikasikan ada terjadi kointegrasi antara ketiga variabel.

4.3 Lag Optimal

Tabel 4.4
**Penentuan Lag Optimal Menurut
AIC dan SIC**

Model	Lag	AIC	SIC	Keterangan
1.a	1	- 8,351285	-0,656220	Lag Optimal
1.b	2	0,689115	0,770352	Lag Optimal
2.a	2	1,228164	1,385548	Lag Optimal
2.b	2	1,197743	1,278703	Lag Optimal

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 4.

Tabel 4.5
Hasil Kausalitas Granger

Variabel	F Statistik	Nilai P	Kesimpulan
D(LPAD) → D(LPDRB)	0,17931	0,88237	Tidak Signifikan
D(LPDRB) → D(PAD)	14,21947	0,00015	Signifikan
D(LPAD) → D(DTP)	0,35667	0,75680	Tidak Signifikan
D(LDTP) → D(PAD)	0,17076	0,97701	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 4.

Keterangan: signifikan pada tingkat 5% (*).

Pada estimasi regresi model 1.b variabel $D(LPDRB_{t-2})$ secara statistik signifikan mempengaruhi $D(LPAD_t)$. Hasil estimasi model ini memberikan kesimpulan bahwa nilai masa lalu pertumbuhan ekonomi $D(LPDRB_{t-2})$ lebih baik di dalam memprediksi. Kondisi ini menjelaskan dan menggambarkan terjadi pola kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke pendapatan asli daerah (*unidirectional causality from DLPDRB_t to DLPAD_t*).

4.4 Analisis Statistik

4.6 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Heteroskedastisitas.

A. Uji F

Dari hasil output diatas melalui Uji-F disimpulkan bahwa model 1.b, pertumbuhan ekonomi ($D(LPDRB)$) signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah ($D(PAD)$).

B. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari keempat model regresi, hanya model 1.b yang nilai R^2 memiliki nilai diatas 0,5 yaitu sebesar 0,5158 yang artinya bahwa 51,58% variasi variable terikat mampu dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya dan 38,42 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisity Model 1.b

F-statistic	0.478664	Probability	0.791831
Obs*R-squared	2.890063	Probability	0.803319

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 4.

Dari tabel diatas terlihat nilai χ^2 hitung sebesar 2,890063 dan nilai χ^2 tabel sebesar 38,8852. Karena nilai χ^2 hitung < tabel maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterosedastisitas dalam model 1b, begitu pula pada model 1.a, 2.a dan 2.b.

B. Uji Autokorelasi

Melalui Uji *Serial Correlation Lagrange Multiplier Test* (LM Test) Tidak terjadi hubungan atau korelasi antara variabel gangguan (*error term*) dari periode sebelum

ke periode sesudahnya pada semua model dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan angka probabilitas yang tidak signifikan (> 0,05) sehingga dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi.

C. Analisis Ekonomi

Hasil Estimasi Regresi Kausalitas Granger Model 1.b

$$D(LPAD_t) = f(D(LPAD_{t-1}), D(LPDRB_{t-1}))$$

untuk D(LPAD) dan D(LPDRB) lag 2

Tabel 4.7
Hasil Pengolahan Model

Dependent Variable: D(LPAD))

Method: Least Squares

Date: 12/02/10 Time: 13:05

Sample(adjusted): 1994:2 2009:2

Included observations: 29 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.080805	0.065502	-1.287683	0.2284
D(LPAD(-2))	-0.009085	0.147203	-0.051987	0.8593
D(LPDRB(-2))	2.104540	0.506931	1.755460	0.0004
R-squared	0.515775	Mean dependent var		0.125507
Adjusted R-squared	0.480214	S.D. dependent var		0.326862
S.E. of regression	0.279792	Akaike info criterion		0,689115
Sum squared resid	2.739915	Schwarz criterion		0,770352
Log likelihood	-7.125142	F-statistic		14.21947
Durbin-Watson stat	1.729930	Prob(F-statistic)		0.000160

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 4.

Berdasarkan hasil estimasi dengan uji kausalitas granger pada model I.b mengenai hubungan antara pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi disimpulkan bahwa terjadi pola kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke pendapatan asli

daerah (*unidirectional causality from LPDRBt to LPADt*). Hal ini dapat dikemukakan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) menyebabkan perubahan pendapatan asli daerah (PAD) dan bukan sebaliknya. Naiknya pertumbuhan ekonomi

sebesar 1% menyebabkan naiknya pendapatan asli daerah sebesar 2,10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mendorong tumbuhnya sumber dan potensi ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah.

Sedangkan pada model II, tidak ditemukan hubungan kausalitas antara dana transfer pemerintah (DTP) dengan pendapatan asli daerah (PAD).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa hanya terjadi kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke pendapatan asli daerah sedangkan kenaikan dana transfer pemerintah yang terjadi dari waktu ke waktu justru tidak berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah. Sebagian besar dana pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah untuk belanja aparatur yang bersifat konsumtif.

5.2 Saran

Bagi pemerintah provinsi Maluku, hasil ini memberikan informasi empiris bahwa untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah maka pemerintah perlu terlebih dahulu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menggerakkan roda perekonomian sehingga dengan sendirinya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah.

REFERENSI

Abimanyu, Anggito, Purwiyanto, Makmun, Subardi, Evi dan Kumu, Suparman Z., 2005, *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak*

Daerah dan Retribusi Daerah, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan R.I., Jakarta.

Arsyad, Lincolin, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, UGM, Yogyakarta.

Boediono., 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 4*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

Gujarati. 2003. *Basic Econometrics*. Singapore : McGraw Hill.

Harvey, A. C. : *Econometric Analysis of time series*, 2d ed., MIT Press, Cambridge, Mass., 1990

Hukom, Alexandra, 2004, *Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bantul, 1975 – 2002)*.

Insukindro, 1993, *Penyusunan Model Ekonomi*, Pusat Antar Universitas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Parkin, M dan Robin Bade, 1997. *Macroeconomics*, Edisi Kedua, Mc.Graw Hill Book Co., New York.

Samuelson, Paul., 1997. *Microeconomics*, fourteenth edition, Mc-Graw Hill, Inc., London.

Simanjuntak, Robert, 2002, *Transfer Pusat ke Daerah: Konsep dan Praktek*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.